

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arinanto, Satya, dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum: dari Konstitusi sampai Implementasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Asshidiqie, Jimly, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & 'Constitutional Law and Constitutional Ethics', Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- _____, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Bede Harris, Essential Constitutional Law, (Sydney-London: Cavendish Publishing, 2000).
- Catherine Tay Swee Kian, Medical Negligence Get The Law On Your Side, (Singapura: Time Books International, 2001).
- Dewi, Alexandra Indriyanti, Etika dan Hukum Kesehatan, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008).
- Fuady, Munir, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007).
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017).
- Konsil Kedokteran Indonesia, Himpunan Peraturan tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, (Jakarta: Indonesian Medical Council, 2006).
- Kurnia, Titon Slamet, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2007).
- Martitah, Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005).
- Palguna, I Dewa Gede, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Purwanti, Ani, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020).
- Sumadi, Ahmad Fadli, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi, (Jakarta: Konpress, 2011).
- Sumadi, Ahmad Fadli, dkk., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik, (Depok: Rajawali Press, 2020).
- Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).
- Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, Ed. 3, (Oxford: Oxford University Press, 1998).

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Andriyawan, “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298K/TUN/2012)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, 2016, halaman 1-31.
- Basarah, Ahmad, “Kajian Teoritis terhadap *Auxiliary State's Organ* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1, Januari 2014, halaman 1-8.
- Ganiem, Leila Mona, “Keterbukaan Informasi Publik pada Konsil Kedokteran Indonesia”, Jurnal Warta ISKI, Vol. 1, No. 2, 2018, halaman 29-40.

- Hariningsih, Sri, “Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Desember 2009, halaman 595-602.
- Izec Masic, dkk., “Evidence Based Medicine: New Approaches and Challenges”, Acta Inform Med, Vol. 16, No. 4, 2008, halaman 219-225.
- Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*)”, Solusi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 19, No. 2, 2021, halaman 165-182.
- Nugrianti, Khairunnisa, Ratna Herawati, dan Sekar Anggun Gading P., “Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, halaman 1-18.
- Putranto, Terawan Agus, dkk., “Intra Arterial Heparin Flushing Increases Cerebral Blood Flow in Chronic Ischemic Stroke Patients Alternative Therapy for Chronic Ischemic Stroke”. Indonesia Biomed J, Vol. 8, No. 2, 2016, halaman 119-126.
- Soemoele, Silwanus A., “Implikasi Hukum Teknologi *Brainwash* (Studi Kasus Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad (K))”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 9, No. 1, Februari 2020, halaman 116-137.
- Soeroso, Fajar Laksono, ““Pembangkangan” terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT”, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 3, Desember 2013, halaman 227-249.

Skripsi dan Tesis

- Prakosa, Timotius Senopati Agastya, “Fungsi dan Peran *Informed Consent* pada Perjanjian Medis (Penerapannya dalam Praktik oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam)”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).
- Ricky, “Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, Tesis Magister Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020).

Trisulo, Evy, “Konfigurasi *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim, dan Risalah Sidang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 pada Acara Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III).

Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 pada Acara Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (V).

Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 pada Acara Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Presiden (VI).